

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang dan Peraturan:

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024.

Peraturan Bupati Ciamis Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Buku:

Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang: DAP Press.

Bevir, M. (2010). *Democratic Governance*. Princeton: Princeton University Press.

Frederickson, H. G., Smith, K. B., Larimer, C., & Licari, M. J. (2018). *The public administration theory primer*. Routledge.

Kjaer, A. M. (2023). *Governance*. John Wiley & Sons.

Moleong, Lexy J. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. (2024). Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Ciamis – Bappeda Kabupaten Ciamis (2024). Pedoman Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan Tahun 2024 dalam Rangka Penyusunan RKPD Kabupaten Ciamis tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Ciamis. (2024). Buku 1: RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten Ciamis Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Ciamis. (2024). Buku 2: RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten Ciamis Tahun 2025.

Santosa, P. (2008). *Fenomena Kebijakan Publik Dalam perspektif Administrasi Publik di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Sugiyono. (2008). *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal dan Skripsi:

Alhadi, Z., Yusran, R., Syarief, A., Riandini, O., & Hidayat, R. (2024). Good Public Policy in Nagari: Solusi untuk Permasalahan Sosial Ekonomi Masyarakat Berbasis Kebijakan Deliberatif di Nagari Binjai Tapan. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(1), 12-12.

Arbayah, S., & Suparti, H. (2022). Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 6(1), 39-48.

- Ardiansyah, Muhammad. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara. *Journal I La Galigo*, vol. 3, no. 1, 1-8.
- Arsiska, M. (2021). Proses Musrenbang Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Seberang Taluk Hilir. *JURNAL PERENCANAAN, SAINS DAN TEKNOLOGI (JUPERSATEK)*, 4(1), 625-627.
- Basri, H., Budi, H., & Teniro, A. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Merumuskan Kebijakan Pada Musrenbang Kampung. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(1), 25-32.
- Carson, L., & Hartz-Karp, J. (2005). Adapting and combining deliberative designs: juries, polls, and forums. In J. Gastil & P. Levine (Eds.), *The deliberative democracy handbook: strategies for effective civic engagement in the twenty-first century* (pp. 120-138).
- Elissa, Lingga. (2022). "Deliberasi dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Nagari Kunangan Parit Rantang, Kecamatan Kamang Baru pada Masa Covid-19." *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, vol. 5, no. 1.
- Guevarrato, G. Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan Anggaran. Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran.
- Hadawiya, Rafi'atul. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat. *Skripsi Universitas Medan Area*.
- Hartz-Karp, J., & Marinova, D. (2020). Using deliberative democracy for better urban decision-making through integrative thinking. *Urban Science*, 5(1), 3.
- Hayati, Y. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Melalui Aplikasi E-Planning Di Kantor Kecamatan Dumai Kota. *Jurnal Niara*, 15(1), 166-173.
- Hendriks, C. M. (2009). Deliberative governance in the context of power. *Policy and Society*, 28(3), 173-184.

- Katiman, K. (2021). *Village Governance and Deliberative Democracy: Examining Empowered Deliberative Forums in Rural Villages, Indonesia*. Available from ProQuest Dissertations & Theses Global: The Humanities and Social Sciences Collection.
- Latuconsina, Nurainy, et al. (2022) "Factors Affecting the Implementation of the Village Development Plan Deliberation (Musrembang) in Waeheru Village, Teluk Ambon District, Ambon City." *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, vol. 9, no. 1.
- Li, R., & Yang, R. (2023). Revisiting Deliberative Governance: The Case of Land Transactions in Rural China. *China Perspectives*, (133), 51-61.
- Martoyo; Elyta; Herlan; Sujendra, Bima. (2021). Deliberative Politics towards of The Government Policy in West Kalimantan Indonesia. *Technium Soc. Sci. J.*, 16, 520.
- Muzaqqi, F. (2013). Politik Deliberatif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan: Analisis Structures and Meanings Atas PP RI No. 28/2008. *Jurnal Konstitusi*, 10(1), 89-116.
- Natalia, A. (2022). Paradigma Good Governance Dalam Administrasi Publik Memfasilitasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 18(1), 15-26.
- Nindhi, N., Shofiy, S., & Ukee, U. (2024). Metamorfosis Ide Pembangunan: Jejak Evolusi dari Zaman ke Zaman. *Konferensi Nasional Mitra FISIP*, 2(1), 511-518.
- Nurdin, M. Y. (2021). Kebijakan Deliberatif Sebagai Dimensi-Dimensi Utama Dalam Penyusunan Kebijakan Publik Yang Unggul. OSF Preprints.
- Nurdin, N. H., Asang, S., & Susanti, G. (2021). Development Planning Deliberatif. In *2nd International Conference on Administration Science 2020 (ICAS 2020)* (pp. 258-264). Atlantis Press.

- Persson, S. (2024). Deliberative ideals and hegemonic practices—political CSR in extractive industries. *Critical Perspectives on International Business*.
- Rafinzar, R., & Astuti, R. S. (2021). Deliberative Democracy Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Studi Pada Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan). *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(3), 429-450.
- Rahmayanti, V. T., Hastika, R. S., Putra, A., & Charin, R. O. P. (2022). Demokrasi Deliberatif: Pelaksanaan Musrenbang di Desa Pengujan Kabupaten Bintan Tahun 2022. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 6(2).
- Sacramento, N. J. (2023). Grassroots involvement on Global South policy narratives and deliberative action on climate change loss and damage. *Public Administration and Policy*, 26(2), 156-168.
- Sihaloho, E. E. (2023). Demokrasi Deliberatif dalam Pembangunan Desa (Analisis Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) Desa Hutabolon, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir). *Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara*.
- Silomba, Arruan, et al. (2020). "Peranan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam Proses Perumusan Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Mamasa." *Journal Pegguruang*, vol. 2, no. 2, 423-477.
- Suroso, Agus, & Rahayu, Ety. (2020). "Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pada Proses Perencanaan Pembangunan Desa." *Jurnal Kridatama Sains dan Teknologi*, vol. 2, no. 02, 60-71.
- Temmar A. (2020). Kebijakan Deliberatif Dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Namtabung Kabupaten Kepulauan Tanimbar. *Journal AdBisPower-STIA Saumlaki*, 1 (2).

Tresiana, N., & Duadji, N. (2016). Kegagalan pemaknaan “Lembaga Musawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa” dalam mewujudkan deepening democracy. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 29(4), 191-203.

Wakhid, Ali A. (2020). "Model Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pola Good Governance." *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, vol. 12, no. 2, 1, 116-131.

Welem., Syaeba, Muhammad., R, Rustan I. (2020). "Peranan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di Kabupaten Mamasa." *Journal Pegguruang*, vol. 2, no. 2, 47-50.

Sumber Lain:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis.

<https://ciamiskab.bps.go.id/id/>

Department of Psychology, University of Virginia

<https://psychology.as.virginia.edu/what-are-diversity-equity-and-inclusion-dei#:~:text=Inclusion%20is%20the%20outcome%20of,people%20participate%20in%20decision%20making>. (diakses pada Senin, 25 November 2024)

Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. 2024. “Perkuat Visi Pembangunan Daerah Sesuai Amanat UU Pemda: Fokus untuk Kemajuan Lokal”.

https://bangda.kemendagri.go.id/berita/baca_kontent/1390/perkuat_visi_pembangunan_daerah_sesuai_amanat_uu_pemda_fokus_untuk_kemajuan_lokal. (diakses pada tanggal 20 Agustus 2024).

Pemerintah Kabupaten Ciamis.

<https://ciamiskab.go.id/> (diakses pada Kamis, 21 November 2024)